

**OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN
DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AZKA FAYYADH DHAFIN SAMPURNO

NIT. 20293538

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

This study focuses on the optimization of land service innovation to increase non-tax state revenue (PNBP), with a case study at the Land Office of Karawang Regency. The background of this research is the importance of the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in providing effective and efficient land services. Service innovation is key to addressing various challenges and meeting the increasingly complex needs of society.

This study aims to evaluate and identify the potential and obstacles in the implementation of the Semprong Klari service innovation at the Land Office of Karawang Regency. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and related document studies.

The results of the study indicate that the Semprong Klari service innovation has great potential in improving the efficiency and effectiveness of land services. This innovation is capable of accelerating the land registration process and significantly increasing non-tax state revenue. However, there are several obstacles in its implementation, including a lack of skilled human resources, budget constraints, and resistance to change.

The conclusion of this study is that the optimization of Semprong Klari service innovation can improve the quality of land services and non-tax state revenue in Karawang Regency. This study suggests that the ATR/BPN Ministry provides more support in the form of training, increased budget, and change management strategies to overcome existing obstacles.

Keywords: *Land Service Innovation, Non-Tax State Revenue (PNBP), Land Office of Karawang Regency, Semprong Klari*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| INTISARI..... | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1. Tujuan Penelitian | 4 |
| 2. Manfaat | 5 |
| D. Batasan Masalah..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>) | 7 |
| B. Landasan Teori | 13 |
| 1. Optimalisasi | 13 |
| 2. Inovasi Layanan Pertanahan | 14 |
| 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak..... | 16 |
| 4. Layanan Semprong Klari | 17 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 18 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 23 |
| A. Format Penelitian | 23 |
| B. Lokasi Penelitian | 23 |
| C. Penetapan dan Jumlah Informan | 24 |
| D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 1. Jenis dan Sumber Data..... | 25 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 26 |

| | |
|---|----|
| E. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN..... | 30 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 30 |
| B. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang..... | 31 |
| C. Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.. | 31 |
| D. Inovasi Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang..... | 32 |
| E. Layanan Sporadis..... | 35 |
| F. Semprong Klari..... | 37 |
| BAB V PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. Potensi Layanan Semprong Klari..... | 41 |
| B. Manfaat Inovasi Layanan Semprong Klari..... | 50 |
| C. Hambatan Dalam Implementasi Layanan Semprong Klari..... | 56 |
| D. Optimalisasi Inovasi Layanan Semprong Klari..... | 61 |
| BAB VI PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah yang memegang peran penting dalam menyelenggarakan layanan pertanahan di Indonesia. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan hukum bagi Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan layanan publik di bidang pertanahan. Dengan fokus pada pengelolaan dan pengaturan sektor pertanahan, peran Kementerian ATR/BPN sangatlah krusial. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola pendaftaran tanah, yang merupakan dasar dari sistem pertanahan yang efektif. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN tidak hanya menjadi penjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas dalam sistem pertanahan Indonesia.

Menurut Bovaird dan Loeffler (2016), penting bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dan reformasi agar dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai lembaga pemerintah menyelenggarakan layanan pertanahan yang ada di Indonesia Kementerian ATR/BPN perlu terus berinovasi untuk menjawab berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan terus berinovasi, baik dalam hal teknologi maupun proses layanan, Kementerian ATR/BPN dapat mengakomodasi kebutuhan yang berkembang dari masyarakat, mempercepat proses pendaftaran tanah, dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Dengan demikian, upaya berkelanjutan dalam berinovasi menjadi esensial bagi Kementerian

ATR/BPN untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan pertanahan di Indonesia.

Permasalahan dalam layanan pertanahan di Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian tersebut dihadapkan pada tugas yang semakin menantang dalam mengelola dan menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat. Inovasi teknologi dan peningkatan proses layanan menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat (Utama, 2021). Langkah-langkah ini bertujuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan menjadi penting dalam memastikan terciptanya sistem pertanahan yang efisien, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Optimalisasi layanan pertanahan menjadi agenda penting dalam upaya Kementerian ATR/BPN untuk menjawab dinamika yang dihadapi dalam penyediaan layanan pertanahan di Indonesia. Melalui upaya optimalisasi ini, Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga mampu memberikan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat terkait kepemilikan tanah. Langkah-langkah dalam optimalisasi layanan dapat meliputi penyederhanaan proses administrasi, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, serta peningkatan kualitas layanan konvensional. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, optimalisasi layanan tidak hanya akan mempercepat proses pendaftaran tanah, tetapi juga akan membantu dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang disediakan.

Optimalisasi layanan pertanahan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui efisiensi proses dan peningkatan volume layanan. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas, Kementerian ATR/BPN dapat memperluas jangkauan layanannya, meningkatkan jumlah transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan PNBP. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024, yang mengoptimalkan layanan sebagai basis penerimaan negara untuk *self financing*. Inovasi berkelanjutan dalam layanan pertanahan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif secara ekonomi melalui peningkatan PNBP.

Salah satu bentuk inovasi layanan pertanahan adalah layanan Sertifikasi Mandiri Perorangan Kelar Satu Hari (Semprong Klari) yang diluncurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Dengan semangat efisiensi dan kepastian waktu, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memperkenalkan layanan ini sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pertanahan yang cepat dan akurat (Nugraha, 2023). Dengan Semprong Klari, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tetapi juga berpotensi untuk memberikan dampak positif secara ekonomi melalui peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 optimalisasi layanan memiliki potensi untuk meningkatkan PNBPN. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikedepankan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana potensi layanan Semprong Klari dalam upaya meningkatkan PNBPN?
2. Apa manfaat yang diperoleh bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dari inovasi layanan Semprong Klari?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi inovasi layanan Semprong Klari untuk meningkatkan PNBPN?
4. Bagaimana kebijakan yang mendukung dapat dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan inovasi layanan Semprong Klari dalam upaya meningkatkan PNBPN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi layanan Semprong Klari dalam upaya peningkatan PNBPN di Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi inovasi layanan Semprong Klari untuk meningkatkan PNBPN.
- b. Menganalisis manfaat yang dapat dihasilkan dari inovasi layanan Semprong Klari.
- c. Mengidentifikasi hambatan dalam mengimplementasikan layanan Semprong Klari.
- d. Mendeskripsikan kebijakan yang mendukung inovasi layanan Semprong Klari.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan baru dalam bidang manajemen pertanahan, inovasi layanan publik, dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- b. Dengan memperbaiki layanan pertanahan melalui inovasi, masyarakat dapat diuntungkan dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan efisien dalam pengurusan dokumen dan izin pertanahan.
- c. Memberikan informasi yang berharga Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam menyusun strategi implementasi layanan Semprong Klari.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Objek Penelitian | : Inovasi layanan Semprong Klari yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang |
| Subjek Penelitian | : Potensi layanan Semprong Klari dalam upaya peningkatan PNBP |
| Lokasi Penelitian | : Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang |

Inovasi layanan pertanahan mencakup berbagai aspek, seperti digitalisasi, kemudahan akses, dan percepatan proses. Namun, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terarah, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada inovasi layanan Semprong Klari yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Optimalisasi layanan pada penelitian ini berfokus pada peningkatan permohonan layanan Semprong Klari dalam upaya meningkatkan PNBP. Semprong Klari, sebagai salah satu inovasi layanan pertanahan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan permohonan layanan pertanahan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan layanan Semprong Klari. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi optimal untuk memaksimalkan penerimaan PNBP dari layanan ini.

Pembatasan subjek penelitian dilakukan untuk fokus pada potensi layanan Semprong Klari dalam upaya peningkatan PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Dengan membatasi subjek penelitian pada potensi layanan Semprong Klari, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang fokus dan bermanfaat. Temuan ini diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam meningkatkan PNBP dan memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan pertanahan di Indonesia.

Pembatasan lokasi penelitian dilakukan untuk memudahkan akses peneliti terhadap sumber data dan informasi yang diperlukan. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat kantor pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang optimalisasi inovasi layanan Semprong Klari dalam upaya meningkatkan PNBP.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan potensi layanan Semprong Klari dalam upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Layanan Semprong Klari memiliki potensi besar dalam meningkatkan PNBP melalui pengoptimalan pengelolaan permohonan layanan pertanahan. Dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah, layanan ini dapat meningkatkan volume permohonan layanan yang dikelola.
2. Inovasi layanan Semprong Klari di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memberikan berbagai manfaat signifikan, antara lain meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat proses sertifikasi tanah, meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Layanan ini juga berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat hingga 98,92 poin, mengurangi praktik percaloan, dan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengurus sertifikasi tanah. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memudahkan proses administrasi pertanahan tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. .
3. Hambatan dalam Implementasi Layanan Semprong Klari seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur teknologi, belum optimalnya layanan Peralihan Hak Perorangan untuk tanah dengan luas tidak lebih dari 500 m², dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat layanan ini.
4. Optimalisasi inovasi layanan Semprong Klari di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi staf, publikasi yang gencar,

serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa layanan berjalan efisien, meningkatkan keterampilan dan efisiensi pegawai, meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan ini, serta memperkuat inovasi dan implementasi yang lebih efektif. Dengan strategi yang tepat, optimalisasi layanan Semprong Klari diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mempercepat dan mempermudah proses pertanahan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan PNBP. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan layanan pertanahan di Indonesia secara lebih luas, dengan fokus pada optimalisasi layanan publik melalui inovasi teknologi dan manajemen yang efektif

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Optimalisasi Inovasi Layanan Pertanahan dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang), berikut adalah beberapa saran penelitian yang dapat dipertimbangkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang:

1. Dari kesimpulan nomor satu, perlu dilakukan pengembangan sistem digital yang terintegrasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Pengembangan dan implementasi sistem digital terintegrasi untuk layanan Semprong Klari. Hal ini termasuk penilaian efektivitas sistem digital dalam mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi kesalahan manusia.

2. Dari kesimpulan nomor dua diperlukan beberapa saran yaitu

a. Evaluasi Kepuasan Pengguna:

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang melakukan survei untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap inovasi layanan Semprong Klari. Penelitian ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana inovasi ini mempengaruhi persepsi pengguna terhadap pelayanan publik dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

b. Analisis Biaya-Manfaat:

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat melakukan analisis biaya-manfaat dari inovasi layanan Semprong Klari. Analisis tersebut dapat menilai apakah biaya yang dikeluarkan untuk inovasi ini sebanding dengan peningkatan PNPB yang dihasilkan, serta manfaat lain yang diperoleh oleh pengguna dan kantor pertanahan.

c. Studi Perbandingan Antar Wilayah:

Mengadakan studi perbandingan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan daerah lain yang telah menerapkan inovasi serupa. Hal ini untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks yang berbeda, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi:

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penerapan inovasi layanan Semprong Klari. Kajian ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana inovasi ini mempengaruhi ekonomi lokal, peningkatan aksesibilitas layanan pertanahan bagi masyarakat, dan dampak sosial lainnya

3. Berdasarkan kesimpulan nomor tiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat melakukan analisis tentang pengaruh inovasi terhadap efisiensi kerja. Analisis ini harus meneliti bagaimana inovasi layanan Semprong Klari mempengaruhi efisiensi kerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Fokus penelitian dapat mencakup dampak inovasi terhadap produktivitas, waktu penyelesaian layanan, dan beban kerja pegawai.
4. Berdasarkan kesimpulan nomor empat, diperlukan pengembangan kebijakan dan regulasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat meninjau kebutuhan pengembangan kebijakan dan regulasi untuk mendukung keberlanjutan inovasi layanan Semprong Klari. Hasil tinjauan tersebut dapat memberikan rekomendasi tentang perubahan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat inovasi dan memastikan implementasi yang lebih efektif dan efisien.
5. Berdasarkan kesimpulan nomor satu hingga empat, perlu dilakukan analisis jangka panjang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan hasil jangka panjang dari penerapan inovasi layanan Semprong Klari. Analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas inovasi ini dalam jangka panjang dan kontribusinya terhadap peningkatan PNBK secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana inovasi layanan Semprong Klari dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R. dkk. (2023) *Innovation*. New York: Routledge.
- Auliadiyanti, K. (2021) *Optimalisasi Pelayanan Dalam Pembuatan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Sidoarjo*.
- Bovaird, T. dan Loeffler, E. (2016) *Public Management and Governance*. Edisi Ke-3. New York: Routledge.
- Fathur, A. dkk. (2023) *Analisis strategi dan dasar hukum penerapan monetisasi youtube sebagai sumber pendapatan asli daerah*.
- Hansson, A. and Andersen, M. (2023) *Optimization for Learning and Control*. New Jersey: John Wiley.
- Hendar and Tanjung, R. (2020) *Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi dan Sinergitas Pengelolaan APBN dan APBD di Kabupaten Karawang, Jurnal Proaksi, 2(2)*.
- Hilda, N. (2014) *Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II*. www.bpn.go.id.
- Kantah Kabupaten Karawang. (2023) *Inovasi Layanan "Semprong Klari" Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang*. Tersedia di: https://youtu.be/Rez7Xcf_OcY?si=dm0ibb4c_xuWNITE (Akses : 2 Juli 2024)
- Khawaja, S., (2011) *Good Governance and Result Based Monitoring*. Islamabad: Poorab Academy.
- Kusumo Wijoyo, D., Pujiriyani, D.W. and Farid, A.H. (2023) *Inovasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Inklusi dan Kearifan Lokal Melalui Layanan Spesial Tanpa Antri dan Pojok Angkringan Konsultasi, Tunas Agraria, 6(3), pp. 187–203*. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.220>.
- Larsson, G. (2010) *Land Management as Public Policy*. University Press of America.
- Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Dalam Angka 2024.
- Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun 2019 – 2024.

- Mahadewi, I.A.G.D.F. and Ariana, I.K.A. (2023) 'Upaya Meningkatkan PNBP Melalui Pemanfaatan Sewa Barang Negara (BMN) Pada Kanwil DJKN Bali Nusra', *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(1), pp. 73–78. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i1.1784>.
- Negara, B.A., Arifuddin and Indrijiawati, A. (2023) *Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak*, *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(2).
- Nugraha, B. (2023) *Kakan BPN Karawang: 'Semprong Klari', Wujudkan Pelayanan yang Cepat dan Handal*, *Suara Merdeka Jakarta*. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/1349591576/kakan-bpn-karawang-semprong-klari-wujudkan-pelayanan-yang-cepat-dan-handal> (Akses: 20 Maret 2024).
- Nugraheni, R.Y., Priyadi, B.P. and Kismartini, K. (2021) *Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online*, *PERSPEKTIF*, 10(1), pp. 47–56. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4017>.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimbangan Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Rahayu, P. (2016) *Inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) sebagai Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II*. Tersedia di : <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1815-di->.

Rogers, E.M. (2003) *Diffusion of Innovations*. Edisi Ke-5. New York: Free Press.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. edisi ke-19 Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eskploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Utama, L. (2021) Inovasi Kementerian ATR/BPN dalam Pelayanan Digital Pertanahan . Available at: <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1422307-inovasi-kementerian-atr-bpn-dalam-pelayanan-digital-pertanahan> (Akses: 22 Juni 2024).

Williamson, I.P. dkk. (2010) *Land administration for Sustainable Development*. ESRI Press Academi